**Bab II**

**Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016**

1. **Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016**

Sejalan dengan penataan organisasi yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Kota Bogor telah menjabarkan melalui Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Cara Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 7 Seri D).

Pada tahun 2017 Dinas Pendapatan Daerah Kota Bogor menjadi Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor setelah sebelumnya menjadi SKPD tersendiri (berpisah) dengan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) pada tahun 2011. Konsekuensi dari berubahnya SKPD ini menuntut Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor untuk lebih meningkatkan kinerja melalui Rencana Kerja.

Menurut Rencana Strategis yang telah disusun dan berdasarkan RPJMD Kota Bogor, maka Program dan Kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor ada 5 (Lima) program, yaitu sbb :

1. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Program Pembinaan, Peningkatan Kapasitas dan Pengembangan Aparatur;
3. Program Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran;
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Inventaris Kantor;
5. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;

Sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2016 menurut Renstra Badan Pendapatan Daerah 2015-2019 dan evaluasi realisasi berdasarkan LAKIP Tahun 2016 adalah :

1. Tercapainya target dan pengamanan semua jenis PAD :
	1. Target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dari target sebesar Rp. 728.030.823.933,- realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 781.362.643.623,- (107,33%);
2. Target Pendapatan Daerah sebesar Rp. 2.158.083.504.950,-, realisasi sampai dengan 31 Desember 2016 sebesar Rp. 2.149.859.139.290,- (99,62%);
3. Prosentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah, dari target prosentase sebesar 30,24% dari realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah, realisasi prosentase tahun 2016 sebesar 36,34%;
4. Prosentase Penambahan Wajib Pajak Non PBB dan BPHTB, dari target 10% (757 WP) dari jumlah Wajib Pajak Non PBB dan BPHTB sebanyak 7.573 WP pada tahun 2015, terealisasi sebanyak 1.129 WP (14.91%);
5. Prosentase penambahan Wajib Pajak PBB, dari target sebesar 2% (4.942 WP) dari jumlah Wajib Pajak PBB tahun 2015 sebanyak 247.111 WP, terealisasi sebanyak 3.386 WP (1.37%);
6. Pemeliharaan Basis Data PBB

Tujuan dari kegiatan ini adalah mendapatkan hasil data obyek PBB lebih valid dan akurat. Dari target 30.000 OP terealisasi sebanyak 243.613 OP (812,04%). Kegiatan ini telah dilaksanakan melalui :

1. Verifikasi Piutang PBB P2 sebanyak 49.000 Objek Pajak dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **KATEGORI****OBJEK PAJAK** | **JUMLAH****OBJEK PAJAK** |
| 1 | Kategori 1 | 324 |
| 2 | Kategori 2 | 2.984 |
| 3 | Kategori 3 | 2.793 |
| 4 | Kategori 4 | 41.940 |
| 5 | Kategori 5 | 695 |
| 6 | Kategori 6 | 264 |
| **JUMLAH** | **49.000** |

1. Pemetaan PBB P2 di seluruh wilayah Kota Bogor sebanyak 194.613 Objek Pajak dengan rincian sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO.** | **KATEGORI****OBJEK PAJAK** | **JUMLAH****OBJEK PAJAK** |
| 1 | Bogor Utara | 40.843 |
| 2 | Bogor Timur | 19.799 |
| 3 | Bogor Selatan | 36.985 |
| 4 | Bogor Barat | 50.814 |
| 5 | Bogor Tengah | 16.848 |
| 6 | Tanah Sareal | 29.324 |
| **JUMLAH** | **194.613** |

1. Terwujudnya transparansi pengelolaan Pajak Daerah :
2. Jumlah Wajib Pajak Daerah yang terhubung secara online, dari target sebesar 10% (552 WP) dari jumlah Wajib Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB sebanyak 5.519 WP pada tahun 2016 jumlah Wajib Pajak Daerah yang terhubung secara online terealisasi sebanyak 220 WP (39,86%);
3. Jumlah Wajib Pajak Daerah yang melakukan pelaporan dan pembayaran secara online

Wajib Pajak Daerah yang melakukan pelaporan secara online dari target sebesar 90% (4.967 WP) dari jumlah Wajib Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB sebanyak 5.519 WP, pada tahun 2016 Jumlah Wajib Pajak Daerah yang melakukan pelaporan secara online terealisasi sebesar 100%. Akan tetapi untuk Wajib Pajak Daerah yang melakukan pembayaran secara online pada dasarnya sudah semua dan terealisasi sebesar 100% termasuk PBB dan BPHTB.

1. Menurunnya tunggakan piutang Pajak Daerah :
2. Prosentase Penyelesaian Piutang Pajak Daerah Tahun Berjalan terhadap Realisasi Pajak Daerah Non PBB, dari target 3% (Rp. 6.908.809.958,-) dari Total Piutang Pajak Daerah sebesar Rp. 230.293.665.253,-, terealisasi sebesar Rp. 22.841.823.835,- (9,92%);
3. Prosentase Penyelesaian Piutang PBB, dari target sebesar 10% (Rp. 20.442.780.407,-) dari Total Piutang PBB sebesar Rp. 204.427.804.072,-, terealisasi sebesar Rp. 22.786.041.209,- (11,15%);
4. Klarifikasi pada Wajib Pajak

Dalam upaya Intensifikasi Pendapatan Daerah khususnya dari sektor pajak daerah adalah dengan melakukan penilaian atas kewajaran dan atau kepatuhan wajib pajak daerah dalam pembayaran pajak, disamping itu juga melakukan pengawasan, penelitian dan menganalisa kepatuhan pembayaran pajak daerah dengan melakukan klarifikasi terhadap wajib pajak daerah. Adapun klarifikasi yang telah dilakukan selama tahun 2016 sebanyak 35 Wajib Pajak (WP) :

* Wajib Pajak Restoran : 22 Wajib Pajak
* Wajib Pajak Parkir : 6 Wajib Pajak
* Wajib Pajak Hiburan : 4 Wajib Pajak
* Wajib Pajak Hotel : 3 Wajib Pajak
1. Pemeriksaan Pajak Daerah

Pemeriksaan Pajak Daerah dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, sebagai dasar regulasi dalam pemeriksaan telah dibuat Perwali Kota Bogor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pemeriksaan Pajak Daerah.

Pemeriksaan Pajak Daerah telah dilaksanakan dari tahun 2013 sampai dengan 2015 sebanyak 18 Wajib Pajak terdiri dari WP Hotel, Restoran dan Hiburan, dan pada tahun 2016 dilakukan Pemeriksaan Pajak sebanyak 10 WP antara lain :

* Februari :

WP Restoran : 1 WP

* Agustus :

WP Hotel : 3 WP

* September :

WP BPHTB : 2 WP

* Oktober :

WP Hotel : 2 WP

* Desember :

WP Hotel : 1 WP

1. Meningkatnya pelayanan kepada wajib pajak :
2. Prosentase jumlah Wajib Pajak yang puas terhadap pelayanan pembayaran pajak, dari target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 95%, realisasi nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 90,11%;
3. Proporsi Ketersediaan Standar Operasional Prosedur terhadap Kebutuhan, dari target Ketersediaan Standar Operasional Prosedur (SOP) sebesar 100% dari total kebutuhan sebanyak 52 SOP, realisasi ketersediaan SOP tahun 2016 sebanyak 52 SOP (100%);
4. Proporsi Ketersediaan Standar Pelayanan terhadap Kebutuhan, dari target 9 Jenis Pajak terealisasi sebanyak 9 Jenis Pajak (100%).
5. Meningkatnya kompetensi dan kapasitas SDM Aparatur :
6. Proporsi aparatur yang telah mengikuti pendidikan teknis substantif, dari target 86 orang (75% dari jumlah pegawai sebanyak 114 orang) terealisasi sebanyak 90 orang (78,95)%;
7. Proporsi aparatur yang telah memiliki sertifikat kompetensi profesi, dari target 34 orang (30% dari jumlah pegawai sebanyak 114 orang) terealisasi sebanyak 90 orang (264,71)%.
8. Tersedianya sarana kerja sesuai kebutuhan :
9. Prosentase ketersediaan teknologi informasi dalam pelayanan pendapatan

Ketersediaan teknologi informasi dalam pelayanan pendapatan dimaksudkan untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan sehingga pada akhirnya pendapatan daerah pun akan meningkat. Saat ini Sistem Pajak Daerah sudah berjalan dengan baik.

Sejak tanggal 18 Desember 2014 pajak daerah selain PBB dan BPHTB sudah terhubung secara online dan diluncurkan secara resmi oleh Walikota Bogor pada tanggal 3 Desember 2014 dengan nama SIPDEH yang menggantikan sistem lama SIMPATDA.

Melalui SIP Deh ini wajib pajak dapat melaporkan jumlah omzet secara online melalui web site/internet dan membayar langsung di BJB.

Selain sistem managemen pajak, telah dibuat pula sistem managemen alur keluar masuk surat yang disebut SIMTAKA (Sistem Tata Naskah). Untuk mengontrol pelayanan PBB telah dibuat pula system arc Log.

Untuk menjalankan setiap sistem informasi yang dimiliki oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor dibutuhkan perangkat/*hardware* yang baik dan handal sehingga optimal dalam dukungan menjalankan pengelolaan pajak daerah. Untuk itu setiap SDM Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor harus dilengkapi oleh perangkat teknologi informasi. Dari 114 orang pegawai Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor, sebanyak 108 orang pegawai sudah dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi dan terhubung secara online. Dari target kinerja Prosentase ketersediaan teknologi informasi dalam dukungan terhadap pelayanan pendapatan sebesar 80% dari jumlah ketersediaan perangkat teknologi informasi, realisasi kinerja sebanyak 108 orang (94,74%).

1. Meningkatnya ketepatan & keakuratan penyusunan pelaporan kinerja dan keuangan :
2. Proporsi penyampaian laporan kinerja dan keuangan secara tepat waktu dan tepat data (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan, dari target 100% terealisasi sebesar 100%;
3. Proporsi tindak lanjut hasil pemeriksaan eksternal dan internal pengawasan, dari target 100% terealisasi sebesar 100%.
4. **Analisis Kinerja Pelayanan SKPD**

BerdasarkanIndikator Kinerja Kunci (IKK)yangditentukan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EPPD)yaitu rasio realisasi PAD terhadap potensi PAD dan peningkatan PAD, pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar Rp. 781.362.643.623,- (107,33%) dari target sebesar Rp. 728.030.823.933,-, terjadi peningkatan bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp. 631.626.924.446,- (105,95%) dari target sebesar Rp. 627.815.080.243,-.

Pendapatan Asli Daerah meliputi Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan/Bagian Laba Usaha Daerah dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun 2016 dari target PAD sebesar Rp. 728.030.823.933,- terdiri dari Pajak Daerah Rp. 465.600.000.000,-, Retribusi Daerah Rp. 56.330.262.700,- Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 32.768.361.795,- dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp. 173.332.199.438,-, telah tercapai PAD sebesar Rp. 781.362.643.623,- (107,33%) terdiri dari Pajak Daerah Rp. 492.138.653.391,- (105,70%), Retribusi Daerah Rp. 62.555.933.956,- (111,05%), Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Rp. 35.753.409.797,- (109,11%), dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Rp. 190.914.646.479,- (110,14%).

Dari data diatas dapat dilihat bahwa Pajak Daerah masih merupakan primadona PAD dengan pencapaian Rp. 492.138.653.391,-atau (105,70%).

Dibandingkan tahun 2015 realisasi PAD sebesar Rp. 631.626.924.446,- (105,95%) dari target sebesar Rp. 627.815.080.243,-, pada tahun 2016 realisasi PAD sebesar Rp. 781.362.643.623,- (107,33%) dari target sebesar Rp. 728.030.823.933,-, berarti terjadi peningkatan realisasi PAD sebesar Rp. 149.735.719.177,-(23,71%) dibanding tahun lalu.

Dengan target 100% dan realisasi PAD sebanyak 107,33% maka capaian kinerjanya sebesar 107,33% (baik).

1. **Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD**

Dalam menentukan isu-isu strategis yang terkait Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah(Bapenda) Kota Bogor, tidak bisa dilepaskan dari lingkungan strategis, baik pada lingkungan eksternal maupun internalnya. Untuk lingkungan eksternal, isu-isu staregis akan dipengaruhi oleh kondisi yang tengah terjadi atau diperkirakan akan tetap berlangsung pada skala internasional, nasional serta regional/local provinsi. Untuk isu-isu strategis yang bersumber dari lingkungan eksternal, antara lain meliputi :

1. Pengelolaan Pajak Hotel, Hiburan dan Restoran berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor. Ini ditandai dengan tingkat *occupancy* hotel yang lebih tinggi pada saat *weekday* dibandingkan *weekend*;
2. Pengelolaan pajak Bea Pengelolaan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) berkaitan dengan investasi di Kota Bogor, khususnya investasi di bidang properti;
3. Selain itu, sejalan dengan semangat untuk memperkuat kapasitas pendapatan di luar sektor perpajakan, maka penggalian potensi-potensi non pajak dari pendayagunaan asset-asset produktif serta perluasan basis usaha Badan Usaha Milik Daerah serta sumber pendapatan lainnya, akan terkait dengan kebijakan yang perlu diambil serta arah kebijakan keuangan nasional yang menyertai pengaturan tata kelola Pendapatan Daerah di era otonomi dewasa ini.
4. **Penelahaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat**

Program/Kegiatan SKPD bisa diusulkan dari masyarakat melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan bisa diusulkan SKPD kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bapeda) melalui forum SKPD.

Dari 23 Kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah tahun 2016 sebagian besar merupakan usulan SKPD dengan melihat prioritas, urgensitas dan permasalahan yang ada untuk mencapai tujuan dan visi utama SKPD yaitu meningkatkan Pendapatan Daerah.

Tahun 2016 usulan dari masyarakat melalui Kelurahan/Kecamatan yang terkait Badan Pendapatan Daerah adalah Mobil Online PBB, kegiatan ini diakomodir pada Kegiatan Penagihan Piutang PBB dan BPHTB. Kegiatan ini mampu meminimalisir piutang PBB P2 dengan operasi sisir PBB P2 bersama aparat wilayah (Kecamatan dan Kelurahan) dan Kegiatan Mobil Online Pembayaran PBB P2 dengan mendatangi warga di Kelurahan dan Kecamatan.

Pada tahun 2016 telah dilakukan 317 kali pelayanan pembayaran dan penagihan melalui kegiatan mobil online, antara lain :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Bulan** | **Jumlah Kelurahan** | **SPPT** | **Realisasi** |
| 1 | Januari | - | - | - |
| 2 | Februari | - | - | - |
| 3 | Maret | 53 | 10.523 | 1.267.544.764 |
| 4 | April | 40 | 6.421 | 909.087.142 |
| 5 | Mei | 40 | 2.862 | 505.305.375 |
| 6 | Juni | - | - | - |
| 7 | Juli | 28 | 1.541 | 241.574.711 |
| 8 | Agustus | 40 | 2.814 | 537.883.051 |
|  | Operasi Sisir | - | 1.989 | 1.134.672.840 |
| 9 | September | 40 | 5.894 | 2.056.922.910 |
| 10 | Oktober | 40 | 1.300 | 153.986.491 |
| 11 | November | - | - | - |
|  | Operasi Sisir | - | 101 | 18.117.544 |
| 12 | Desember | 36 | 880 | 96.241.906 |
| **JUMLAH** | **317** | **34.325** | **6.921.336.734** |